

PERAN HUMAN CAPITAL LOKAL TERHADAP TATA KELOLA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA RELIGI TUAN GURU SYEKH ABDURRAHMAN SIDDIQ

Abdurrahman Dipasanta¹, SM Guntur², Raju Maulana³

^{1,2,3}Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

*e-mail: hajipa2@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 07 08, 2026

Revised 07 08, 2026

Accepted 07 09, 2026

Keywords:

Local Human Capital
Governance
Religious Tourism
Tuan Guru Syekh
Abdurrahman Siddiq
Community-Based Innovation

Info Artikel

Article history:

Diterima 07 08, 2026

Direvisi 07 08, 2026

Disetujui 07 09, 2026

Kata Kunci:

Human Capital Lokal
Tata Kelola
Wisata Religi
Tuan Guru Syekh
Abdurrahman Siddiq
Inovasi Berbasis
Komunitas

Abstract

This study aims to analyze the role of local human capital in the governance of the development of the religious tourism site of Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq in Indragiri Hilir Regency, Riau Province. Religious tourism based on Islamic scholarly figures has its own distinctive character, as it requires a balance between spiritual, historical, and cultural values and aspects of sustainable management. The study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, field observation, and documentation. Informants were selected purposively, comprising tourism site managers, community leaders, village officials, local youth, and pilgrims. Data analysis used the interactive model of Miles and Huberman. The findings reveal that local human capital plays a strategic role in four dimensions of governance, namely participatory planning, narration of historical and spiritual narratives, service and infrastructure management, and digital promotion driven by the youth community. The social trust held by local human resources is also proven to strengthen the legitimacy of management and the sustainability of the destination's values. This study concludes that the quality of religious tourism governance is greatly influenced by the active involvement of local human capital, not merely as technical implementers, but also as guardians of narratives, social mediators, and drivers of community-based innovation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran human capital lokal dalam tata Kelola pengembangan objek wisata religi Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Wisata religi berbasis ketokohan ulama memiliki kekhasan tersendiri karena menuntut keseimbangan antara nilai spiritual, historis, dan kultural dengan aspek pengelolaan yang berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, meliputi pengelola objek wisata, tokoh masyarakat, perangkat desa, pemuda lokal, dan peziarah. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa human capital lokal berperan strategis dalam empat dimensi tata kelola, yakni perencanaan partisipatif, pemanduan narasi sejarah dan spiritual, pengelolaan layanan dan infrastruktur, serta promosi digital berbasis komunitas pemuda. Kepercayaan sosial yang dimiliki SDM lokal juga terbukti memperkuat legitimasi pengelolaan dan keberlanjutan nilai destinasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas tata kelola wisata religi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif human capital lokal, bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penjaga narasi, mediator sosial, dan penggerak inovasi berbasis komunitas.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi wisata religi, didukung oleh warisan sejarah Islam yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Keberadaan makam para ulama, wali, dan tokoh agama menjadi daya tarik utama bagi peziarah dari berbagai daerah. Wisata religi bukan sekadar kegiatan kunjungan biasa, melainkan merupakan perpaduan antara pengalaman spiritual, penghormatan terhadap nilai historis, serta penguatan identitas keagamaan masyarakat.

Sektor pariwisata di Indonesia menunjukkan peran yang semakin strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Melalui pengembangan potensi wisata lokal, pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. [1] menegaskan bahwa pariwisata telah memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Data Badan Pusat Statistik (2023) mencatat bahwa kunjungan wisatawan nusantara ke destinasi wisata religi terus mengalami peningkatan signifikan pasca pandemi, menegaskan bahwa segmen ini memiliki daya tahan dan potensi pertumbuhan yang besar. Oleh karena itu, pengelolaan sektor pariwisata perlu dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Wisata religi memiliki karakteristik yang khas dibandingkan jenis wisata lainnya, karena menyentuh dimensi spiritualitas dan nilai sakral yang melekat pada tempat atau tokoh yang menjadi pusat kunjungan. Kompleksitas ini menuntut tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada aspek infrastruktur dan komersial, tetapi juga harus mempertimbangkan pelestarian nilai-nilai religius, historis, dan budaya yang menjadi ruh dari destinasi tersebut.

Salah satu tokoh ulama terkemuka yang menjadi pusat wisata religi di Provinsi Riau adalah Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq, ulama besar Melayu dari Indragiri Hilir yang memiliki pengaruh luas dalam penyebaran Islam di kawasan Melayu-Nusantara pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Makam beliau yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi destinasi ziarah yang dikunjungi oleh ribuan peziarah setiap tahunnya, tidak hanya dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga dari Malaysia dan Singapura. Besarnya animo kunjungan ini menunjukkan bahwa situs tersebut memiliki nilai spiritual dan historis yang diakui secara luas. Namun demikian, potensi besar ini belum sepenuhnya dioptimalkan melalui tata kelola yang sistematis dan berbasis pada pemberdayaan sumber daya manusia lokal, sehingga menjadi tantangan nyata yang perlu segera ditangani.

Dalam kerangka pengembangan destinasi wisata, keberadaan human capital lokal memegang peranan yang tidak dapat diabaikan. Human capital lokal merujuk pada kualitas sumber daya manusia masyarakat setempat yang tercermin dari pengetahuan, keterampilan, pengalaman, jaringan sosial, serta nilai-nilai budaya dan spiritual yang dimiliki [2]. Masyarakat lokal yang memiliki kapasitas memadai tidak hanya mampu menyediakan layanan wisata, tetapi juga dapat menjadi penjaga narasi sejarah, mediator sosial antara pengunjung dan nilai sakral destinasi, serta penggerak inovasi dalam pengelolaan dan promosi destinasi. Dalam konteks wisata religi, peran ini bahkan menjadi lebih krusial, karena masyarakat lokal adalah pewaris langsung dari tradisi dan nilai spiritual yang menjadi inti dari daya tarik destinasi.

[3] menegaskan bahwa manusia merupakan bentuk modal yang memiliki nilai ekonomi dan sosial, yang dapat ditingkatkan melalui investasi pada pendidikan, pelatihan, keterampilan, serta pengalaman praktik. Sejalan dengan itu, investasi pada human capital lokal dalam konteks pengembangan wisata religi berarti memperkuat kapasitas masyarakat setempat agar mampu mengelola destinasi secara profesional, sekaligus mempertahankan autentisitas nilai spiritual dan historis yang menjadi daya tarik utama. Dengan demikian, human capital bukan sekadar faktor pendukung, melainkan variabel strategis yang menentukan kualitas dan keberlanjutan tata kelola destinasi secara keseluruhan.

Namun pada kenyataannya, banyak objek wisata religi di Indonesia yang masih dikelola secara tradisional tanpa perencanaan yang terstruktur, disertai keterbatasan kapasitas SDM lokal, serta minimnya keterlibatan komunitas dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pengalaman wisata, mengancam keberlanjutan destinasi, bahkan menimbulkan konflik sosial akibat ketidakjelasan peran dan distribusi manfaat antarpihak. Kesenjangan antara potensi besar yang dimiliki dan kapasitas pengelolaan yang masih terbatas inilah yang menjadi celah penelitian yang perlu dijawab secara ilmiah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud menganalisis secara mendalam bagaimana peran human capital lokal berkontribusi terhadap kualitas tata kelola pengembangan objek wisata religi Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq di Kabupaten Indragiri Hilir. Berbeda dari kajian sebelumnya yang umumnya berfokus pada aspek infrastruktur atau promosi wisata, penelitian ini menekankan dimensi sumber daya manusia sebagai faktor penentu dalam tata kelola wisata religi berbasis ketokohan ulama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan manajemen pariwisata berbasis komunitas di Indonesia, khususnya dalam konteks wisata religi yang berpusat pada ketokohan ulama.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran human capital lokal dalam tata kelola pengembangan objek wisata religi Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana kontribusi human capital lokal terhadap pengembangan dan keberlanjutan objek wisata religi Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq di Kabupaten Indragiri Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran human capital lokal dalam tata kelola pengembangan objek wisata religi Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengkaji kontribusi human capital lokal terhadap pengembangan dan keberlanjutan objek wisata religi Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Human Capital Lokal

Konsep human capital dalam teori ekonomi modern dikembangkan secara sistematis oleh Gary S. Becker melalui karyanya *"Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis"* (1964). Becker menegaskan bahwa manusia merupakan bentuk modal yang memiliki nilai ekonomi dan sosial, yang dapat ditingkatkan melalui investasi pada pendidikan, pelatihan, keterampilan, serta pengalaman praktik, sehingga menghasilkan peningkatan produktivitas individu maupun organisasi [3]. Teori ini menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor fundamental dalam pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan. Human capital lokal, sebagai turunan dari konsep tersebut, dipahami sebagai totalitas kapasitas sumber daya manusia yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari komunitas setempat. [4] mendefinisikan human capital lokal sebagai modal manusia yang melekat pada masyarakat asli suatu daerah, mencakup pengetahuan, pengalaman, keterampilan teknis, jejaring sosial, nilai budaya, serta kemampuan inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan dan pengembangan potensi wilayah. Dalam era 2020-an, dimensi human capital lokal semakin diperluas, tidak hanya mencakup kompetensi individual, tetapi juga kemampuan kolektif seperti membangun kolaborasi, menggerakkan komunitas, dan memanfaatkan literasi

Dalam konteks pariwisata berbasis masyarakat, SDM lokal menjadi penggerak utama karena merekalah yang paling memahami karakter pengunjung, narasi historis destinasi, pola sosial keagamaan masyarakat, serta dinamika pengelolaan di level tapak [5]. [6] menegaskan bahwa pendekatan community-driven development dalam pariwisata menempatkan warga lokal bukan sekadar sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai aktor utama pengambil keputusan, pengelola kegiatan, penjaga narasi sejarah, dan pelaku inovasi di tingkat destinasi. Dalam wisata religi secara spesifik, human capital lokal memiliki dimensi yang lebih luas karena mencakup kompetensi teknis sekaligus otoritas moral dan kultural, terutama dalam menjaga nilai sakral dan menyampaikan narasi spiritual yang autentik kepada pengunjung [7][8]. Oleh karena itu, human capital lokal dalam destinasi wisata religi tidak hanya berperan sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai modal legitimasi sosial dan penjaga keberlanjutan nilai destinasi.

2.2 Tata Kelola (*Governance*) Destinasi Wisata

Tata kelola destinasi wisata pada perkembangan mutakhir tidak lagi dipahami sebagai proses pengelolaan yang bersifat tunggal dan berpusat pada pemerintah, melainkan sebagai mekanisme kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi program pariwisata. [9] menjelaskan bahwa collaborative governance dalam kebijakan pariwisata daerah menekankan keterlibatan multipihak, seperti pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media, dalam membangun sistem tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan destinasi. Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, tata kelola juga menuntut adanya partisipasi masyarakat, komitmen antar pemangku kepentingan, ketersediaan sumber daya, penguatan kapasitas, serta dukungan regulasi sebagai dasar pengembangan destinasi yang inklusif dan berkelanjutan [10]. Sejalan dengan itu, [11] menegaskan bahwa tata kelola pariwisata berbasis komunitas sangat bergantung pada hubungan antaraktor, struktur jaringan, serta posisi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, tata kelola destinasi wisata dapat dipahami sebagai proses kolaboratif berbasis jaringan yang menempatkan pemerintah, pengelola,

masyarakat lokal, pelaku usaha, dan komunitas sebagai aktor yang saling berinteraksi untuk menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan destinasi. Dalam konteks pariwisata, [12] menegaskan bahwa tata kelola destinasi wisata (destination governance) menekankan prinsip pengelolaan yang transparan, partisipatif, kolaboratif, dan akuntabel, dengan pengambilan keputusan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

[6] dan [13] mengembangkan konsep destination governance partisipatif dalam konteks pariwisata lokal Indonesia, dengan menekankan bahwa governance yang baik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat sosial-kultural dan berbasis kepercayaan komunitas. Pada dekade 2020-an, governance pariwisata lokal juga menuntut inovasi berbasis platform digital sebagai alat penguatan kelembagaan, promosi, manajemen kunjungan, dan pelayanan wisata [14]. Dalam wisata yang berakar pada ketokohan lokal, tata kelola tidak bisa dilepaskan dari aspek kepercayaan sosial (social trust) masyarakat, karena legitimasi pengelolaan destinasi sering kali tumbuh dari penerimaan dan dukungan komunitas setempat terhadap figur, narasi, dan lembaga yang mengelola [8]. Dengan demikian, governance dalam pariwisata lokal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat sosial-kultural dan berbasis kepercayaan komunitas.

2.3 Wisata Religi Berbasis Ketokohan Ulama

Wisata religi merupakan aktivitas perjalanan yang tidak hanya berorientasi pada rekreasi, tetapi juga berhubungan dengan kebutuhan spiritual, penghormatan terhadap nilai sejarah keagamaan, serta pengalaman sakral yang melekat pada tokoh, tempat, dan tradisi keagamaan tertentu. [15] menjelaskan bahwa wisata religi merupakan bentuk wisata yang lebih mengedepankan ketenangan batin dan umumnya berkaitan dengan tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah atau hubungan dengan agama Islam, seperti ibadah haji dan umrah, ziarah wali, wisata masjid, serta kunjungan ke situs keagamaan. Sejalan dengan itu, [16] menegaskan bahwa wisata religi sering dipahami sebagai wisata ziarah, yaitu perjalanan menuju tempat-tempat yang memiliki makna khusus bagi umat beragama dengan tujuan memperoleh pengalaman spiritual dan memperkuat hubungan religius. Dalam konteks sosial-budaya, wisata religi juga menjadi ruang pertemuan antara praktik ritual, pelestarian tradisi, dan pemaknaan nilai sakral oleh masyarakat lokal maupun peziarah [17]. Sementara itu, dalam perspektif dakwah Islam, konsep perjalanan keagamaan memiliki keterkaitan dengan istilah al-rihlah, yaitu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang dapat menjadi metode dakwah dan sarana penyebaran nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat [18]. Dengan demikian, wisata religi dapat dipahami sebagai perjalanan yang memadukan dimensi spiritual, historis, sosial, budaya, dan dakwah, sehingga pengelolaannya perlu memperhatikan keseimbangan antara pelayanan wisata dan pelestarian nilai sakral destinasi.

Pada destinasi ziarah berbasis ulama, ketokohan ulama menjadi pusat narasi, pusat kepercayaan, serta pusat daya tarik utama bagi peziarah atau pengunjung. Pengembangan destinasi semacam ini menuntut tata kelola yang sensitif terhadap nilai sakral dan pelestarian narasi spiritual-historis [7][8]. Pengembangan wisata berbasis ulama tidak bisa semata diarahkan pada aspek komersial, melainkan harus menjaga keseimbangan antara layanan kunjungan dan nilai sakral destinasi agar tidak terjadi degradasi makna spiritual dari figur yang menjadi pusat ziarah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamanatkan bahwa benda, bangunan, dan situs yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, serta kebudayaan harus dilindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan. Makam Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq sebagai salah satu situs cagar budaya dan pusat wisata religi di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki relevansi langsung dengan amanat tersebut.

2.4 Community Based Tourism (CBT) Dan Social Trust

Teori Community Based Tourism (CBT) dipopulerkan oleh Goodwin dan Santilli [13], yang menegaskan bahwa pengembangan pariwisata berbasis lokal harus menempatkan komunitas sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, serta distribusi manfaat wisata. Masyarakat lokal memiliki otoritas narasi, sumber daya sosial, dan kontrol keberlanjutan destinasi yang tidak dapat digantikan oleh pihak eksternal manapun. [19] dan [13] memperluas konsep CBT dalam konteks Indonesia dengan menekankan peran kelompok pemuda, komunitas lokal, dan UMKM sebagai penggerak inovasi layanan, pemanduan narasi sejarah, dan promosi berbasis platform digital. Teori Social Trust yang dikembangkan oleh Francis Fukuyama (1995) menyatakan bahwa kepercayaan sosial merupakan modal penting dalam keberhasilan tata kelola berbasis komunitas maupun kelembagaan, karena trust membentuk legitimasi moral, kohesi sosial, serta efektivitas kolaborasi antar aktor pembangunan [8]. Dalam kajian wisata spiritual dan ziarah, [8] menegaskan bahwa figur ulama menjadi pusat trust dan legitimasi sosial, sehingga SDM lokal yang mengelola destinasi juga harus memiliki penerimaan dan kepercayaan komunitas agar pengelolaan narasi sejarah, spiritual, dan pelayanan kunjungan dapat berjalan secara autentik dan berwibawa.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti & Tahun	Tujuan & Metode	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan di Rokan Hilir	Iswanti & Zulkarnaini (2022)	Kualitatif deskriptif; teori Pitana & Gayatri. Mengetahui peran pemerintah desa dan hambatan.	Relevan dalam aspek peran aktor lokal, namun penelitian ini lebih spesifik pada human capital dan wisata religi.
2	Strategi Pemerintah Desa Gadukepuh terhadap Pengembangan Objek Wisata Religi	Mukhirto dkk. (2022) [20]	Kualitatif; menggali strategi pengembangan wisata religi, faktor pendukung dan penghambat.	Sejalan dalam konteks wisata religi, tetapi tidak membahas human capital lokal secara spesifik.
3	Tinjauan Hukum Islam terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat dalam	Ahmad Anwar (2023)	Menganalisis pengaruh pengembangan wisata religi terhadap ekonomi masyarakat dalam perspektif hukum Islam.	Relevan dari sisi dampak ekonomi wisata religi, berbeda pada fokus kajian tata kelola dan SDM lokal.
4	Peran Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Wisata Religi di Makam Sunan Bonang Tuban	Nurhidayah (2021)[21]	Kualitatif; mengkaji peran masyarakat lokal dalam keberlanjutan wisata religi.	Sangat relevan; menjadi acuan dalam memahami dimensi partisipasi lokal dalam wisata religi.
5	Pengelolaan Wisata Religi di Makam Syekh Burhanuddin Ulakan: Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Lokal	Siregar & Fatmawati (2022) [22]	Kualitatif; mengkaji kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan wisata religi.	Relevan secara konteks, memperkuat argumen pentingnya kolaborasi multi-aktor dalam tata kelola destinasi religi.

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu di atas, terdapat celah penelitian (research gap) yang belum banyak dikaji, yaitu analisis peran human capital lokal secara spesifik terhadap tata kelola destinasi wisata religi yang berpusat pada ketokohan ulama. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengambil kasus objek wisata religi Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq di Kabupaten Indragiri Hilir.

2.6 Kerangka Pemikiran


Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi alamiah di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengalaman, pandangan, keterlibatan, dan makna yang dibangun oleh masyarakat lokal dalam tata kelola pengembangan objek wisata religi. [23] menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam memahami fenomena secara kontekstual. Sejalan dengan itu, [24] menyatakan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah

sosial atau kemanusiaan. [25] juga menegaskan bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman partisipan secara mendalam melalui proses pengumpulan data yang bersifat terbuka dan interpretatif. Dengan demikian, pendekatan kualitatif deskriptif dinilai relevan untuk menganalisis peran human capital lokal dalam tata kelola pengembangan objek wisata religi Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq, karena fenomena tersebut bersifat kontekstual, dinamis, dan berkaitan erat dengan realitas sosial masyarakat setempat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Objek Wisata Religi Makam Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq, yang berlokasi di Sapat, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih secara purposive berdasarkan beberapa pertimbangan: (a) nilai historis dan spiritual yang tinggi sebagai pusat penyebaran Islam di kawasan Melayu-Riau; (b) potensi kunjungan wisata religi yang besar dari berbagai daerah bahkan mancanegara; serta (c) keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaannya yang menjadikan lokasi ini relevan untuk dikaji dari perspektif human capital lokal.

3.3 Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi: (a) Kepala desa atau perangkat desa yang membawahi kawasan wisata; (b) Pengelola objek wisata religi; (c) Tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat; (d) Pemuda lokal yang terlibat dalam pengelolaan atau promosi wisata; (e) Peziarah atau wisatawan yang berkunjung. Informan dikembangkan secara snowball apabila ditemukan informan kunci yang mengarah pada narasumber baru yang relevan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan kepada informan kunci untuk memperoleh data mengenai peran pemerintah desa, strategi pengembangan wisata, kendala yang dihadapi, serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola wisata. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan panduan wawancara yang dikembangkan berdasarkan indikator variabel penelitian.

Kedua, observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi sarana-prasarana, aktivitas pengunjung, keterlibatan masyarakat, serta mekanisme pengelolaan objek wisata. Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto, arsip, laporan, peraturan desa, notulen rapat, data kunjungan wisatawan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan wisata religi.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Tahap pertama, reduksi data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, memilah, dan menyederhanakan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang direduksi difokuskan pada informasi yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia lokal, bentuk partisipasi masyarakat, serta mekanisme tata kelola objek wisata religi. Tahap kedua, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks agar temuan penelitian lebih mudah dipahami, terutama dalam melihat pola, hubungan, dan kecenderungan antar data. Tahap ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi secara mendalam terhadap data yang telah disajikan dengan memperhatikan keterkaitan antara human capital lokal dan efektivitas tata kelola objek wisata religi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai kategori informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat keabsahan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah [26].

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

a. Profil Objek Wisata Religi Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq

Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq merupakan ulama besar Melayu yang lahir di Sapat, Indragiri Hilir,

pada tahun 1857 M dan wafat pada tahun 1939 M. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama paling berpengaruh di kawasan Melayu-Nusantara, dengan karya ilmiah keislaman yang tersebar luas di Riau, Semenanjung Malaya, dan Sumatera. Di antara karya monumentalnya adalah kitab "Risalah Amal Ma'ruf Nahi Munkar" dan berbagai tulisan tasawuf serta fikih yang menjadi rujukan masyarakat Melayu. Makam beliau yang terletak di Sapat, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir, telah menjadi pusat ziarah yang dikunjungi ribuan peziarah setiap tahunnya, terutama pada peringatan haul (hari kematian) yang diperingati setiap tahun. Secara fisik, kawasan wisata religi ini mencakup kompleks makam, mushala, aula penerimaan tamu, area parkir, serta sejumlah kios pedagang lokal di sekitar situs. Fasilitas pendukung masih terus dalam proses pengembangan, dan pengelolaannya melibatkan kombinasi antara keluarga ulama, tokoh masyarakat, komunitas pemuda lokal, serta dukungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Kunjungan wisatawan tidak hanya berasal dari berbagai kabupaten/kota di Riau, tetapi juga dari Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, bahkan dari Malaysia dan Singapura yang memiliki hubungan historis erat dengan Syekh Abdurrahman Siddiq.

b. Peran Human Capital Lokal dalam Tata Kelola Wisata Religi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi yang dilakukan, ditemukan bahwa human capital lokal berperan dalam empat dimensi utama tata kelola objek wisata religi Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq, sebagaimana diuraikan berikut:

1) Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Partisipatif

Masyarakat lokal, khususnya tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga ulama, terlibat aktif dalam proses perencanaan pengembangan kawasan wisata. Musyawarah komunitas menjadi mekanisme utama dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan situs, penentuan jadwal haul, penataan pedagang sekitar, serta pengaturan kunjungan wisatawan. Pola partisipasi ini sejalan dengan prinsip destination governance yang dikemukakan oleh [6] yang menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Seorang tokoh masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa seluruh keputusan besar mengenai pengelolaan makam dan kawasan wisata selalu dibicarakan bersama antara keluarga, tokoh agama, dan pemerintah desa sebelum dilaksanakan.

2) Pemanduan Narasi Sejarah dan Spiritual Ulama

Salah satu peran paling krusial dari human capital lokal adalah kemampuannya dalam menyampaikan narasi sejarah dan nilai spiritual yang melekat pada tokoh ulama kepada para pengunjung. Pemandu wisata lokal yang berasal dari komunitas setempat, termasuk keluarga ulama dan santri yang menguasai sejarah dan ajaran Syekh Abdurrahman Siddiq, mampu memberikan pengalaman ziarah yang lebih bermakna dan autentik dibandingkan apabila pengelolaan diserahkan kepada pihak luar. Temuan ini memperkuat argumen [7] bahwa dalam wisata religi berbasis ulama, pemanduan narasi sejarah dan spiritual sangat bergantung pada SDM lokal yang memiliki pengetahuan historis, kedekatan emosional, dan kepercayaan sosial terhadap tokoh tersebut. [8] juga menegaskan bahwa SDM lokal yang mengelola destinasi religi harus memiliki penerimaan dan kepercayaan komunitas agar pengelolaan narasi berjalan secara autentik dan berwibawa.

3) Pengelolaan Layanan dan Infrastruktur Wisata

Masyarakat lokal terlibat langsung dalam penyediaan berbagai layanan wisata, mulai dari penjualan oleh-oleh dan kuliner khas lokal, penyediaan jasa transportasi dan akomodasi sederhana, hingga pemeliharaan kebersihan dan ketertiban kawasan situs. Keterlibatan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, tetapi juga memastikan bahwa standar layanan yang diberikan tetap sesuai dengan nilai dan norma sosial budaya setempat. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan [28] yang menjelaskan bahwa pengeluaran wisatawan dapat menimbulkan dampak ekonomi langsung bagi unit usaha lokal, terutama melalui transaksi pada layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, tiket, parkir, dan pembelian produk pendukung wisata. Selain itu, dampak ekonomi pariwisata juga dapat berkembang menjadi dampak tidak langsung dan lanjutan melalui efek pengganda, yaitu ketika pendapatan yang diterima pelaku usaha dan tenaga kerja lokal kembali berputar dalam perekonomian masyarakat setempat. [29] menegaskan bahwa multiplier effect dalam pariwisata menunjukkan keterkaitan antara pengeluaran wisatawan, peningkatan aktivitas ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan sektor pendukung destinasi. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat lokal dalam layanan wisata religi Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq dapat dipahami sebagai bentuk penguatan ekonomi komunitas yang muncul melalui transaksi langsung wisatawan, pengembangan UMKM lokal, dan perputaran pendapatan di sekitar kawasan destinasi.

4) Promosi Digital Berbasis Komunitas Pemuda Lokal

Generasi muda lokal yang memiliki literasi digital mulai mengambil peran aktif dalam mempromosikan

objek wisata religi ini melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Konten yang dibuat mencakup dokumentasi kegiatan haul, narasi sejarah ulama dalam format video pendek, serta informasi praktis mengenai tata cara ziarah dan fasilitas yang tersedia. Upaya ini terbukti meningkatkan jangkauan promosi destinasi ke audiensi yang lebih luas, termasuk generasi muda dan diaspora Melayu di luar negeri. Temuan ini sejalan dengan [9] yang menegaskan bahwa literasi digital pemuda lokal merupakan komponen penting dalam penguatan human capital lokal era modern, sekaligus instrumen inovasi dalam pengembangan promosi destinasi wisata daerah. [5] menambahkan bahwa pemuda lokal berperan sebagai penggerak governance di level akar rumput, termasuk dalam memperkuat promosi digital destinasi.

c. Kontribusi Human Capital Lokal terhadap Keberlanjutan Destinasi

Selain peran dalam tata kelola sehari-hari, human capital lokal juga memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan destinasi wisata religi dalam jangka panjang. Kontribusi ini mencakup tiga aspek utama: keberlanjutan nilai spiritual, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan sosial-budaya.

Dalam aspek keberlanjutan nilai spiritual, human capital lokal berperan sebagai penjaga autentisitas narasi dan nilai sakral yang melekat pada Syekh Abdurrahman Siddiq. Tanpa keterlibatan aktif komunitas yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran dan sejarah ulama tersebut, terdapat risiko terjadinya komersialisasi berlebihan yang dapat mendegradasi nilai spiritual destinasi. Keseimbangan antara layanan kunjungan dan pemeliharaan nilai sakral ini menjadi salah satu capaian utama yang dijaga oleh human capital lokal [7]. Dalam aspek keberlanjutan ekonomi, keterlibatan masyarakat lokal dalam berbagai lini usaha di sekitar kawasan wisata memastikan bahwa manfaat ekonomi dari kegiatan wisata dapat didistribusikan secara lebih merata kepada komunitas setempat. Hal ini selaras dengan prinsip CBT yang dikemukakan [13], yang menekankan pentingnya distribusi manfaat wisata kepada komunitas lokal sebagai syarat keberlanjutan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Dalam aspek keberlanjutan sosial-budaya, trust yang terbentuk antara komunitas pengelola dan peziarah menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan destinasi. [8] menegaskan bahwa kepercayaan sosial merupakan modal penting dalam keberhasilan tata kelola berbasis komunitas, karena trust membentuk legitimasi moral, kohesi sosial, serta efektivitas kolaborasi antar aktor. Dalam konteks destinasi religi berbasis ulama, trust ini dibangun melalui konsistensi komunitas lokal dalam menjaga nilai dan norma yang berkaitan dengan figur ulama yang menjadi pusat destinasi.

d. Tantangan dan Hambatan dalam Pengelolaan

Meskipun human capital lokal telah menunjukkan peran yang signifikan, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan kontribusi SDM lokal dalam tata kelola wisata religi. Tantangan utama yang ditemukan meliputi:

- 1) Keterbatasan kapasitas manajerial SDM lokal dalam aspek perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, dan administrasi destinasi.
- 2) Belum adanya sistem pelatihan dan pengembangan kapasitas yang terstruktur bagi pengelola dan komunitas lokal.
- 3) Koordinasi antar stakeholder yang masih bersifat informal dan belum memiliki payung kelembagaan yang kuat.
- 4) Akses terhadap teknologi informasi yang belum merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang lebih tua.
- 5) Keterbatasan anggaran pengembangan dari pemerintah daerah.

Temuan ini mendukung argumentasi [6] bahwa keberhasilan community-based tourism tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan kapasitas yang telah ada, tetapi memerlukan investasi berkelanjutan dalam pengembangan human capital lokal melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut.

1. Human capital lokal berperan strategis dalam tata kelola pengembangan objek wisata religi Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq di Kabupaten Indragiri Hilir. Peran tersebut mencakup empat dimensi utama yaitu keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan partisipatif, pemanduan narasi sejarah dan spiritual ulama yang autentik, pengelolaan layanan dan infrastruktur wisata, serta promosi digital berbasis komunitas pemuda lokal. Keempat dimensi ini saling berkaitan dan membentuk ekosistem tata kelola yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama, bukan sekadar pelaksana teknis.

2. Human capital lokal memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan dan keberlanjutan destinasi wisata religi dalam tiga aspek yaitu keberlanjutan nilai spiritual melalui penjagaan autentisitas narasi dan nilai sakral ulama, keberlanjutan ekonomi melalui distribusi manfaat wisata kepada komunitas lokal, serta keberlanjutan sosial-budaya melalui penguatan social trust antara komunitas pengelola dan peziarah. Kontribusi-kontribusi ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata religi yang berkelanjutan sangat bergantung pada kapasitas dan keterlibatan aktif human capital lokal sebagai penggerak utamanya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir, perlu adanya program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang terstruktur bagi pengelola wisata religi lokal, mencakup aspek manajerial, hospitality, dan literasi digital agar pengelolaan destinasi dapat berjalan lebih profesional dan berkelanjutan.
2. Bagi pengelola dan komunitas lokal, perlu dilakukan formalisasi koordinasi antar pemangku kepentingan yang selama ini masih bersifat informal, misalnya melalui pembentukan forum atau kelompok kerja pengelolaan wisata religi yang terstruktur sehingga pengambilan keputusan dapat lebih sistematis dan akuntabel.
3. Bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian lanjutan yang mengkaji model pengembangan wisata religi berbasis human capital lokal di destinasi-destinasi serupa di wilayah Riau maupun Indonesia secara lebih luas.
4. Bagi masyarakat lokal, khususnya generasi muda, perlu terus didorong keterlibatan aktif dalam promosi digital dan pelestarian nilai-nilai spiritual dan budaya yang menjadi daya tarik utama destinasi wisata religi ini, sehingga autentisitas dan keberlanjutan destinasi dapat terjaga untuk generasi mendatang.

REFERENSI

- [1] L. Suryani, "Kontribusi sektor pariwisata terhadap pembangunan ekonomi daerah," *J. Ekon. dan Pambang.*, vol. 22, no. 2, pp. 101–116, 2021.
- [2] B. Prasetyo and A. Kurniawan, "Human capital lokal dalam pengembangan ekonomi daerah," *J. Manaj. dan Bisnis Indones.*, vol. 6, no. 1, pp. 15–28, 2020.
- [3] M. Ali, *Human capital dan pengembangan sumber daya manusia*. Jakarta: Pustaka Akademik, 2021.
- [4] A. Prasetyo and R. Kurniawan, "Human capital lokal dalam pengembangan potensi wilayah," *J. Manaj. dan Pambang. Drh.*, vol. 12, no. 1, pp. 55–68.
- [5] D. Sari, A. Prasetyo, and H. Nugroho, "Peran komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat," *J. Pariwisata Indones.*, vol. 18, no. 1, pp. 41–58, 2022.
- [6] P. Nugroho, "Community-based tourism dan tata kelola destinasi wisata lokal," *J. Kepariwisata Indones.*, vol. 14, no. 2, pp. 77–90.
- [7] A. Hidayat and A. Fauzi, "Pengembangan wisata religi berbasis nilai spiritual dan kearifan lokal," *J. Pariwisata Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 101–115.
- [8] Ismail, "Social trust dalam tata kelola wisata religi berbasis komunitas," *J. Sos. Keagamaan*, vol. 8, no. 1, pp. 45–58, 2023.
- [9] D. Wijaya, R. Pratama, and A. Imran, "Collaborative governance dalam kebijakan pengembangan destinasi wisata daerah," *J. Adm. Negara*, vol. 30, no. 1, pp. 77–95, 2024.
- [10] A. Imran and D. Wijaya, "Collaborative governance dalam pengembangan destinasi wisata berkelanjutan," *J. Adm. Publik Indones.*, vol. 11, no. 1, pp. 25–41, 2025.
- [11] F. Zitri, M. Hidayat, and A. Rahman, "Community governance dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat," *J. Ilmu Adm.*, vol. 21, no. 1, pp. 1–16, 2026.
- [12] R. Safitri, D. Wulandari, and H. Putra, "Destination governance dalam pengembangan destinasi wisata berbasis partisipasi masyarakat," *J. Adm. Publik dan Pariwisata*, vol. 4, no. 2, pp. 66–78.
- [13] H. Rahman and A. Salim, "Community-based tourism dan social trust dalam pengembangan destinasi wisata Indonesia," *J. Pariwisata Terap.*, vol. 7, no. 1, pp. 32–48, 2023.
- [14] A. Pratama and M. Yusri, "Literasi digital sebagai penguatan human capital masyarakat lokal pada sektor pariwisata," *J. Manaj. Indones.*, vol. 21, no. 3, pp. 215–228, 2021.
- [15] N. Rahmawati, R. Hidayat, and D. Lestari, "Wisata religi sebagai penguatan nilai spiritual dan budaya masyarakat," *J. Pariwisata Berkelanjutan*, vol. 9, no. 1, pp. 52–67, 2024.
- [16] D. Nurfadhila and A. Suganda, "Wisata religi sebagai penguatan identitas spiritual masyarakat," *J. Kepariwisata Indones.*, vol. 16, no. 2, pp. 134–147, 2021.

- [17] R. Tresnawaty, "Wisata religi dalam perspektif sosial budaya masyarakat Indonesia," *J. Sociol. Agama*, vol. 19, no. 1, pp. 44–60, 2025.
- [18] M. Fikri, "Konsep al-rihlah sebagai media dakwah Islam dalam perspektif Al-Qur'an," *J. Dakwah dan Komun. Islam*, vol. 7, no. 2, pp. 155–170, 2022.
- [19] G. Irhamdhika, N. Iman, E. Hidayah, Y. Ariska, D. A. Ningtyas, and A. Sari, "Krisis kepercayaan publik: Fenomena #KaburAjaDulu dan peran humas pemerintah dalam merespons cancel culture," *J. Komun. Pemerintah.*, vol. 6, no. 1, pp. 7–15.
- [20] M. Mukhirto, A. Dwijayanto, and T. Fathoni, "Strategi pemerintah Desa Gandukepuh terhadap pengembangan objek wisata religi," *J. Community Dev. Disaster Manag.*, vol. 4, no. 1, pp. 23–35.
- [21] Nurhidayah, "Peran masyarakat lokal dalam pengembangan wisata religi di Makam Sunan Bonang Tuban," *J. Parivisata Indones.*, vol. 17, no. 1, pp. 55–70, 2021.
- [22] E. Siregar and R. Fatmawati, "Pengelolaan wisata religi di Makam Syekh Burhanuddin Ulakan: Kolaborasi pemerintah dan masyarakat lokal," *J. Parivisata dan Budaya Islam*, vol. 6, no. 2, pp. 75–89, 2022.
- [23] Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif (Edisi ke-5)*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- [24] J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2023.
- [25] J. W. Creswell and C. N. Poth, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*, 5th ed. Sage Publications, 2024.
- [26] Z. Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- [27] S. Sugiyanto, R. Rahmawati, and A. Suarman, "Penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Kecamatan Cibinong," *J. Ekon. Manaj. Sist. Inf.*, vol. 6, no. 4, pp. 2788–2799, 2025, doi: 10.38035/jemsi.v6i4.4616.
- [28] R. Nugraha and Y. Flora, "Dampak ekonomi pariwisata terhadap masyarakat lokal melalui efek pengganda," *J. Ekon. Pembang.*, vol. 23, no. 1, pp. 87–102, 2022.
- [29] A. Farmaki, P. Christou, A. Saveriades, and E. Spanou, "Tourism impacts and local economic development: A review of multiplier effects," *Sustainability*, vol. 14, no. 8, pp. 1–18, 2022.